



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

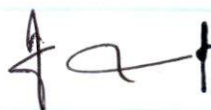
BUPATI KONAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Konawe tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PARAF KOORDINASI
f a d

- 1882);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6

PARAF KOORDINASI



- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
 12. Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

PARAF KOORDINASI



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan komunikasi dan informatika untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang


PARAF KOORDINASI



memiliki nilai manfaat.

8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
12. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
13. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

PARAF KOORDINASI



15. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.


BAB II

PETA RENCANA SPBE

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kabupaten Konawe dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Konawe.
- (3) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE Kabupaten Konawe;
 - b. Manajemen SPBE Kabupaten Konawe;
 - c. Layanan SPBE Kabupaten Konawe;
 - d. Infrastruktur SPBE Kabupaten Konawe;
 - e. Aplikasi SPBE Kabupaten Konawe;
 - f. Keamanan SPBE Kabupaten Konawe; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan :

PARAF KOORDINASI



- a. perubahan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe;
 - b. perubahan rencana strategis Kabupaten Konawe;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Konawe.
- (5) Reviu Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :
- a. BAB I - PENDAHULUAN;
 - b. BAB II - VISI MISI DAN SASARAN SPBE;
 - c. BAB III - KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN KONAWE;
 - d. BAB IV - TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN KONAWE;
 - e. BAB V - ANALISA KESENJANGAN
 - f. BAB VI - PETA RENCANA SPBE KABUPATEN KONAWE;
 - g. BAB VII - DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENERAPAN SPBE; dan
 - h. BAB VIII - PENUTUP.
- (6) Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 25 Juli 2024





PJ. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	sekda	
2	Asisten III	
3	Karis Kampu	
4	kabag Hukum	
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR ...669...

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) muncul sebagai jawaban terhadap tantangan dan dinamika era digital yang tengah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk tatanan pemerintahan. Perubahan mendasar dalam paradigma komunikasi dan pertukaran informasi mengharuskan pemerintahan untuk memperbarui dan meningkatkan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, SPBE menjadi sebuah landasan revolusioner yang tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi pusat perhatian banyak negara di seluruh dunia, dan pemerintahan elektronik menjadi pendorong utama dari perubahan ini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. SPBE hadir sebagai solusi inovatif untuk meminimalkan hambatan administratif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah konsep inovatif yang menjadi tonggak penting dalam transformasi pemerintahan di tengah era digital. Pada konteks lokal, Kabupaten Konawe sebagai wilayah yang dinamis dan berkembang memandang bahwa implementasi SPBE adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat keterbukaan, dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah jawaban atas segala kondisi yang ada, terkait penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe tahun 2023 - 2028 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kurun waktu 5 tahun. Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI);
20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
23. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 Tentang Pemantaun dan Evaluasi SPBE;
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;
25. Peraturan Kabupaten Konawe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Konawe;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (Kerangka SPBE)
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (Arah Strategis SPBE)
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (Rencana Aksi SPBE) tahun 2024 - 2028

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan strategis pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Tersedianya acuan langkah penyiapan SPBE di Kabupaten Konawe yang melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK dan SDM SPBE;
3. Tersedianya panduan pelaksanaan SPBE yang melingkupi layanan administrasi pemerintahan terpadu dan layanan publik terpadu.

1.4. Ruang Lingkup

1. BAB II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

2. BAB III : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE yang telah ada saat ini, serta visi misi sasaran strategis RPJMD tahun 2021 -2026

3. BAB IV : TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini menggambarkan tahapan SPBE yang berorientasi pada *output Smart Government* dan capaian target indeks SPBE.

4. BAB V : ANALISA KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisa kesenjangan dari setiap domain, aspek dan indikator dari SPBE , berdasarkan kondisi aktual dan target yang akan dicapai.

5. BAB VI : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN KONAWE

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu 2024 – 2028, dengan kelompok Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, SDM SPBE, Audit TIK.

6. BAB VII : DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENERAPAN SPBE

Bab ini memberikan detail tahapan kegiatan dengan kerangka proyek (ruang lingkup kegiatan, waktu, sumber daya).

7. BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Konawe selama 2024 -2028.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Konawe

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi secara proses bisnis. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kelanjutan dari era *e-Government* menuju *Smart Government*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Konawe selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.1.2 Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Konawe dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Konawe adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Konawe adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

2.2. Arah Kebijakan Strategi SPBE Kabupaten Konawe

Dasar arah kebijakan strategi SPBE Konawe adalah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE yang semua tertera dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018, ditambahkan dengan langkah percepatan transformasi digital dari Pemerintah Pusat serta RPJMD Kabupaten Konawe 2021 – 2026. Di dalamnya terdapat arah strategi jangka panjang dan jangka menengah.

2.2.1 Tujuan Jangka Panjang



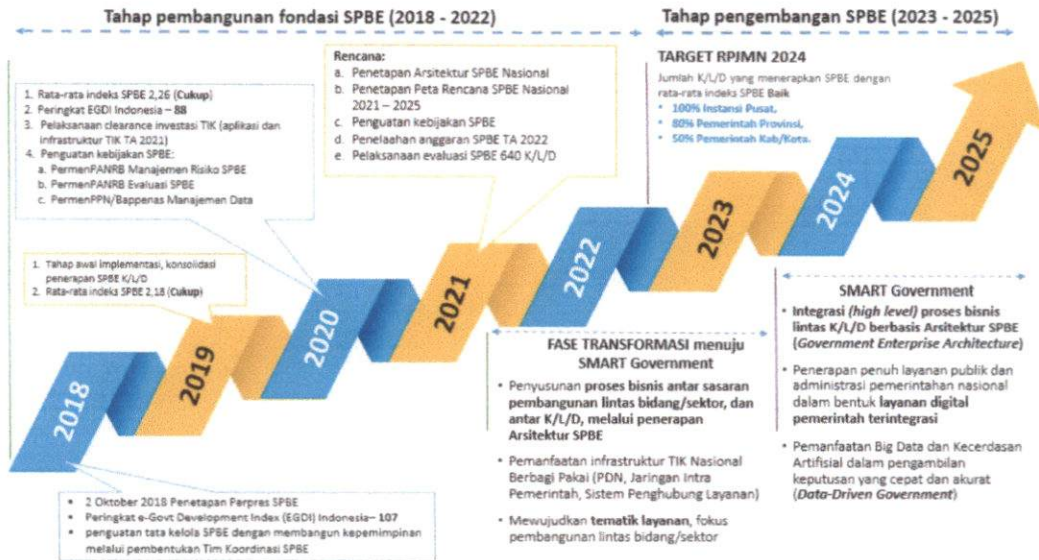
Gambar 1. Milestone Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terdapat 5 buah *milestone* langkah jangka panjang yang terkait dengan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kerangka transformasi digital pemerintahan.

- 1) **Penyederhanaan Birokrasi berbasis Digital (*Digital Bureaucracy*)**
Melakukan langkah yang komprehensif dan menyeluruh mulai dari proses bisnis, organisasi, kebijakan dan SDM, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah :
 - a. Percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional
 - b. Percepatan digitalisasi pemerintahan dengan penataan proses bisnis tematik
 - c. *Collaborative working* pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.
 - d. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
 - e. Penyediaan Sistem Database Manajemen Talenta untuk mendukung reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN berdasarkan kebutuhan dan merit sistem (*mission oriented*).
- 2) **Pemulihan Ekonomi melalui manajemen kinerja (*Digital Work Management*)**
Digital Work Management adalah pengelolaan dalam produktivitas dan kolaborasi instansi, memberikan semua orang di organisasi visibilitas, akuntabilitas, dan kontrol yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sesuatu.
- 3) **Peningkatan Kualitas SDM berbasis digital (*Digital Mindset*)**
Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Pemerintah telah menetapkan ada 4 pilar yaitu Etis Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital dan Budaya Bermedia Digital.
- 4) **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan adaptif (Digital Government)**
Penyelenggaraan pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*citizen-driven approach*).
- 5) **Pelayanan Publik (*Digital Service*)**
Menyediakan layanan publik elektronik yang terpadu, secara proses bisnis dan data. Adapun manfaat yang akan didapat adalah :
 - Efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. (mudah, murah,cepat, tuntas)
 - Meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan.
 - Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah.
 - Membangun *trust society* kepada pemerintah.

2.2.2 Tujuan Jangka menengah

SPBE NASIONAL



Gambar 2. Fase Arah Strategis SPBE Nasional

Selaras dengan arah strategis SPBE Nasional, maka terdapat 2 fase yang menjadi arah strategis SPBE Kabupaten Konawe, yaitu :

1. Fase Transformasi menuju *Smart Government*

Dengan target target yang harus dicapai adalah :

- Tersusunnya proses bisnis terintegrasi lingkup OPD Kabupaten Konawe dan Kabupaten/Kota
- Termanfaatkannya TIK berbagi pakai
 - Pusat Data, hanya terdapat beberapa Pusat Data dengan standar internasional yang dapat digunakan bersama antar OPD atau dengan kabupaten kota sebagai DRC (*Disaster Recovery Center*)
 - Jaringan Intra Pemerintahan, interkoneksi antar OPD di Kabupaten Konawe atau dengan kabupaten/kota yang tertutup dan internet dengan koneksi terpusat dan didistribusikan
 - Sistem Penghubung Layanan, memudahkan berbagi pakai data antar instansi dengan mekanisme *Government Service Bus* (GSB)
- Terwujudnya Layanan Terpadu lintas sektor yang tematik

2. Fase terbentuknya *Smart Government*

Dengan target target yang akan dicapai adalah :

- Telah terwujud integrasi proses bisnis antar OPD, yang diturunkan dari visi misi Kepala Daerah

- Tersedianya Layanan Digital terintegrasi
- Tersedianya *Data Driven Government*, pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis pada data (*big data* dan kecerdasan buatan)

2.3. Sasaran Strategis SPBE Kabupaten Konawe

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

2.3.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Konawe.
 - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Konawe perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Konawe adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Konawe; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Konawe dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2.3.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe; dan
 - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.3.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
 - mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe;
 - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe.

- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
 3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

2.3.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe:
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

- b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.4. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Penilaian SPBE memiliki 4 Domain, 8 Aspek dan 47 Indikator , yang dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

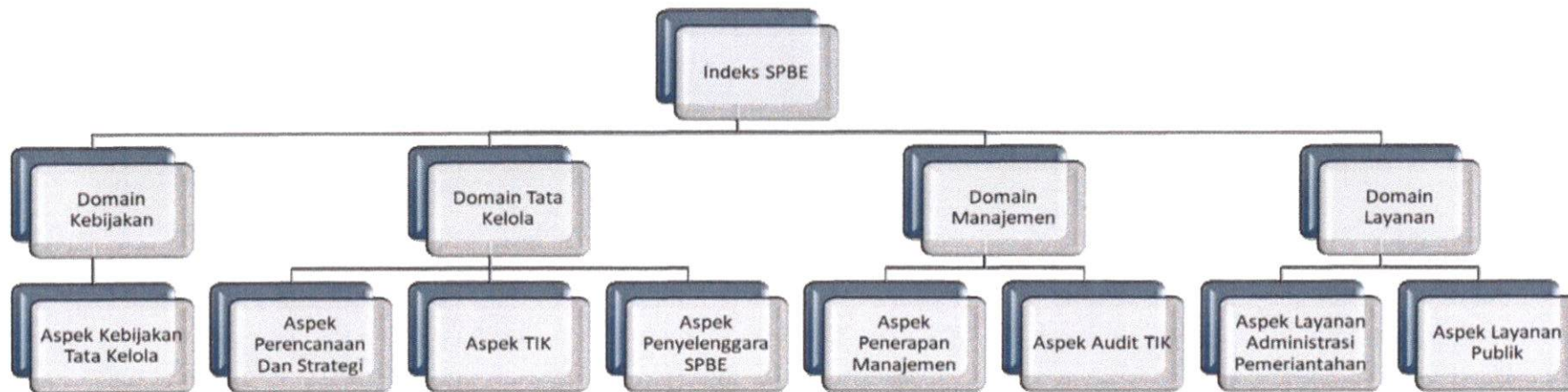
1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Di dalam setiap indikator terdapat kegiatan/aktifitas yang disertai dengan data dukung sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut.

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang



Gambar 3. Evaluasi Indeks SPBE Tahun 2021

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Level Indeks SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

Berikut adalah pemetaan terhadap indikator dan data dukung, ditunjukkan oleh gambar 4.

DATA DUKUNG

Kebijakan Internal	Kebijakan Tata Kelola SPBE	Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan audit TIK SPBE	Terdapatnya Perbup/Perda yang mengambil referensi dari Perpres 95 Tahun 2018, dengan ruang lingkup
Tata Kelola	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE	Terdapatnya Peta Rencana dan Arsitektur SPBE
	Teknologi informasi dan komunikasi	Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE	Dokumen aktifitas pengembangan aplikasi SPBE, dokumen daftar layanan pusat data, dokumen SOP operasional pusat data, dokumen SOP perawatan pusat data, daftar layanan jaringan intranet, dokumen SOP operasional jaringan, dokumen SOP perawatan jaringan, dokumentasi pengoperasian sistem penghubung layanan
	Penyelenggara SPBE	Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE	Dokumentasi pelaksanaan program Tim Koordinasi SPBE, dokumentasi aktifitas kegiatan kolaborasi penerapan SPBE
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE	Pedoman/panduan: Risiko, SMKI, Data, Pengetahuan, Aset TIK, Kompetensi SDM, Perubahan, Layanan
	Audit TIK	Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE	Laporan audit aplikasi, infrastruktur, keamanan informasi
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintahan	Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya
	Layanan Publik	Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lain	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya

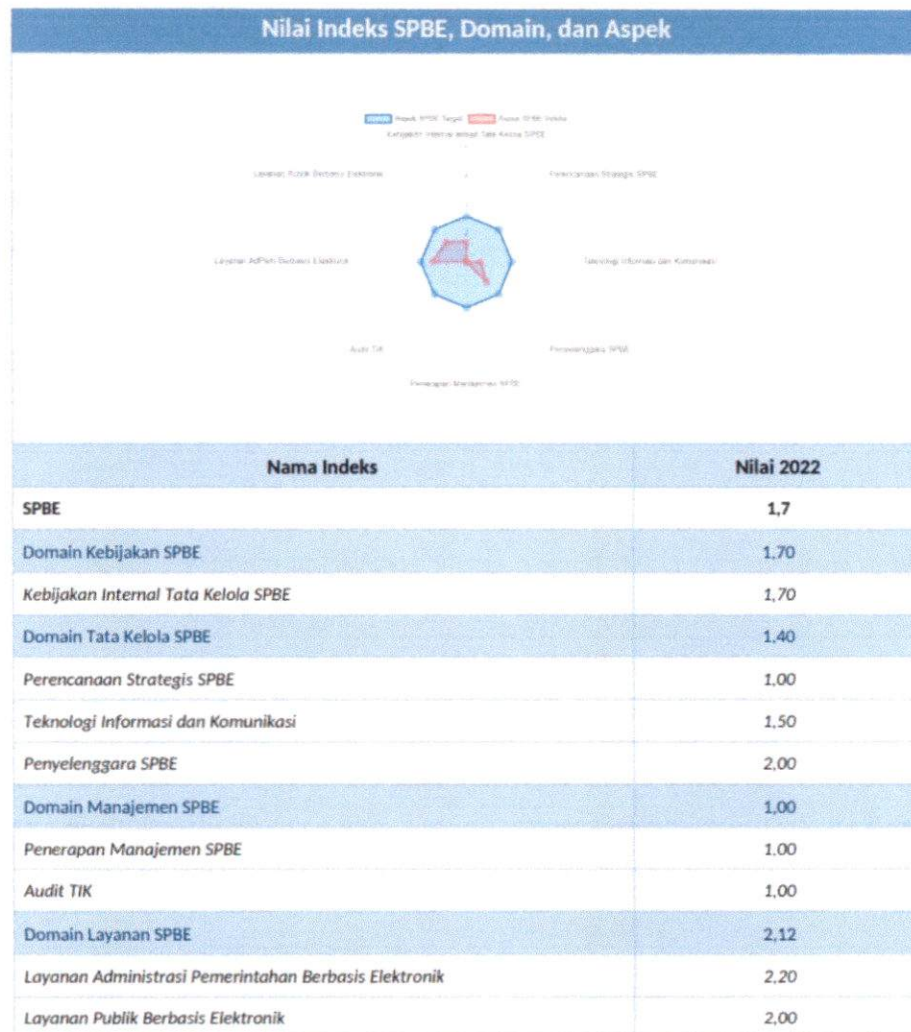
Gambar 4. Indikator dan Data Dukung Evaluasi Indeks SPBE

BAB III

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN KONAWE

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2022

Kementerian PANRB pada tahun 2022 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Konawe yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar **1,7**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe tahun 2022 sebagai berikut :



Gambar 5. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Konawe Tahun 2022

Dengan nilai indeks **1,7** maka Kabupaten Konawe masuk kategori **Kurang**. Yang jika diurai dalam karakteristik , sebagai berikut :

- Domain Kebijakan : (1,7) Terkelola
Kebijakan internal telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di perangkat daerah, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
- Domain Tata Kelola : (1,4) Terkelola
Proses tata kelola ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di perangkat daerah, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
- Domain Manajemen SPBE: (1) Rintisan
Pengaturan manajemen SPBE dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.
- Domain Layanan : (2,12) Interaksi
Layanan SPBE diberikan melalui informasi dua arah.

3.2. Kondisi Aktual Penerapan SPBE

3.2.1. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah

No	Nama OPD
1	Sekretariat Daerah Kab. Konawe
2	Sekretariat DPRD Kab. Konawe
3	Inspektorat Kabupaten Konawe
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe
6	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Konawe
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe
10	Badan Pendapatan Daerah Kab. Konawe
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe
12	Dinas Kesehatan Kab. Konawe
13	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe

No	Nama OPD
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe
15	Dinas Sosial Kab. Konawe
16	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Konawe
18	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Konawe
19	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe
22	Dinas Perhubungan Kab. Konawe
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konawe
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Konawe
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Konawe
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Konawe
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan PP Kab. Konawe
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Konawe
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Konawe
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Konawe
32	Badan Narkotika Kab. Konawe
33	Kecamatan Soropia
34	Kecamatan Lalonggasumeeto
35	Kecamatan Sampara
36	Kecamatan Bondoala
37	Kecamatan Besulutu
38	Kecamatan Kapoiala
39	Kecamatan Anggalomoare
40	Kecamatan Morosi
41	Kecamatan Lambuya
42	Kecamatan Uepai
43	Kecamatan Puriala
44	Kecamatan Onembute
45	Kecamatan Pondidaha
46	Kecamatan Wonggeduku
47	Kecamatan Amonggedo
48	Kecamatan Wonggeduku Barat
49	Kecamatan Wawotobi

No	Nama OPD
50	Kecamatan Anggotoa
51	Kecamatan Meluhu
52	Kecamatan Konawe
53	Kecamatan Unaaha
54	Kecamatan Anggaberri
55	Kecamatan Abuki
56	Kecamatan Latoma
57	Kecamatan Tongauna
58	Kecamatan Asinua
59	Kecamatan Padanguni
60	Kecamatan Tongauna Utara
61	Kecamatan Rوتا

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Konawe digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Konawe.

3.2.2. Kondisi Aktual Penerapan SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat berdasarkan nilai dari masing-masing indikator Indeks SPBE yang dinilai pada tahun 2022, seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 6. Kondisi Aktual Penerapan SPBE

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
Domain Kebijakan SPBE		
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
8	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
Domain Tata Kelola SPBE		
11	Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
Domain Manajemen SPBE		
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
Domain Layanan SPBE		
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1

1. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE belum dipenuhi oleh Pemkab Konawe karena sampai saat ini Peraturan Bupati Konawe tentang Penyelenggaraan SPBE belum ditetapkan (masih bersifat draft).

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini belum terlihat adanya kebijakan internal terkait tata kelola SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menggambarkan kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE belum ada yang memenuhi level 4-5. Ada beberapa kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE yang telah mencapai kematangan level 3 di Pemkab Konawe yaitu Kebijakan Internal Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Manajemen Keamanan Informasi.

- Kelemahan

Pemkab Konawe masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Internal Audit TIK, dimana tidak

ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan.

2. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum dipenuhi oleh Pemka Konawe karena sampai saat ini dokumen Arsitektur SPBE, dokumen Peta Rencana SPBE, dan dokumen Proses Bisnis belum tersedia.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya dokumen terkait perencanaan strategis SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menunjukkan bahwa tingkat kematangan Perencanaan Strategis SPBE belum ada yang memenuhi level 4-5.

- **Kelemahan**

Pemkab Konawe masih belum memiliki dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan dokumen Proses Bisni , dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung. Rencana dan Anggaran SPBE telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan daerah namun belum seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Pemkab Konawe.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Konawe adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, layanan pusat data yang telah digunakan oleh instansi dalam lingkun Pemkab Konawe, dan adanya Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya tatakeloa TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menunjukkan bahwa tingkat kematangan indikator terkait aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum ada yang memenuhi level 4-5.

- **Kelemahan**

Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe belum tersedia, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan Pusat Data sudah ada namun belum digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemkab Konawe. Layanan Jaringan Intra Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah sudah mulai dibangun namun belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah.

4. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Konawe adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya penyelenggaraan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menunjukkan bahwa tingkat kematangan indikator terkait aspek Penyelenggaraan SPBE belum ada yang memenuhi level 4-5.
- **Kelemahan**
Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemkab Konawe dalam penerapan SPBE belum dilaksanakan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tersebut. Tim Koordinasi SPBE sudah dibentuk namun tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE tersebut belum dilaksanakan seluruhnya.

5. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Konawe adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Data

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya penyelenggaraan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menunjukkan bahwa tingkat kematangan indikator terkait aspek Penerapan Manajemen SPBE belum ada yang memenuhi level 4-5.
- **Kelemahan**
Penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemkab Konawe belum dilaksanakan kecuali kegiatan Penerapan Manajemen Data, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait Penerapan Manajemen SPBE.

6. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum ada yang dipenuhi oleh Pemkab Konawe.

- Kekuatan

Pada Aspek Audit TIK ini belum terlihat adanya kegiatan audit TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan manajemen SPBE pada Pemkab Konawe. Hasil penilaian dokumen dan interviu menunjukkan bahwa tingkat kematangan indikator terkait aspek Audit TIK belum ada yang memenuhi level 4-5.

- Kelemahan

Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE belum dilaksanakan di lingkungan Pemkab Konawe, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait kegiatan/pelaksanaan Audit TIK SPBE.

7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Konawe adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Layanan perencanaan dibuktikan dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Pemda Konawe telah menggunakan aplikasi SIPD Kemendagri.

- Kelemahan

Penerapan Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik di lingkungan Pemkab Konawe belum dilaksanakan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait layanan-layanan tersebut.

8. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Konawe adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektor 1.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Konawe. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Konawe telah menggunakan aplikasi SP4N Lapor dan dantelah dibentuk SK Bupati Konawe tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator LAPOR SP4N Kab. Konawe.

- Kelemahan

Penerapan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Data Terbuka, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3 berbasis Elektronik di lingkungan Pemkab Konawe belum dilaksanakan, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung terkait layanan-layanan tersebut.

3.2.3. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, seperti ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 7. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK

NO	Nomor dan Perihal	Jenis
1	Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Daerah

3.2.4. Infrastruktur Jaringan

Dari sisi infrastruktur jaringan, sudah terdapat jaringan intra pemerintah antar sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jaringan internet yang terpusat di Diskominfo.

Tabel 8. Daftar OPD yang sudah terhubung Jaringan Fiber Optik

NO	NAMA OPD	STATUS
1	Inspektorat Kabupaten Konawe	Terkoneksi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe	Terkoneksi
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe	Terkoneksi
4	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe	Terkoneksi
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe	Terkoneksi
6	Sekretariat Daerah Kab. Konawe	Terkoneksi

NO	NAMA OPD	STATUS
7	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Konawe	Terkoneksi
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe	Terkoneksi
9	Badan Pendapatan Daerah Kab. Konawe	Terkoneksi
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe	Terkoneksi
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan PP Kab. Konawe	Terkoneksi
12	Sekretariat DPRD Kab. Konawe	Terkoneksi
13	Dinas Kesehatan Kab. Konawe	Terkoneksi
14	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe	Terkoneksi
16	Dinas Sosial Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Konawe	Terkoneksi
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Konawe	Terkoneksi
19	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
20	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe	Terkoneksi
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe	Terkoneksi
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Konawe	Terkoneksi
23	Dinas Perhubungan Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konawe	Terkoneksi
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Konawe	Terkoneksi
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Konawe	Terkoneksi
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Konawe	Terkoneksi
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Konawe	Terkoneksi
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Konawe	Belum Terkoneksi
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Konawe	Terkoneksi
32	Badan Narkotika Kab. Konawe	Terkoneksi

BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN KONAWE

4.1. Target SPBE Kabupaten Konawe

Target SPBE Kabupaten Konawe terbentuknya Smart Government di tahun 2028, dimana indikator untuk hal tersebut adalah :

1. Telah terbentuknya integrasi proses bisnis antar OPD
2. Telah tersedianya layanan digital pemerintah terintegrasi
3. Telah tersedianya analisa data hingga tataran diagnosa, prediktif dan preskriptif untuk mengambil keputusan dan kebijakan

Untuk mencapai target tersebut, tentu terdapat serangkaian proses yang harus dilakukan sebagai bentuk *quality assurance*, yaitu indeks SPBE. Indeks SPBE bernilai 5 atau memuaskan adalah target yang ditetapkan untuk dapat dicapai oleh Kabupaten Konawe selama 5 tahun ke depan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Target SPBE Kabupaten Konawe

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2028	Uraian Target
Kebijakan	1,70	5	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola • Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,70	5	
Tata Kelola	1,40	5	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif • Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
Perencanaan Strategis SPBE	1,00	5	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50	5	
Penyelenggara SPBE	2,00	5	
Manajemen	1,00	5	<ul style="list-style-type: none"> • Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	5	

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2022	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2028	Uraian Target
Audit TIK	1,00	5	standarisasi oleh semua unit organisasi terkait, dievaluasi secara periodik dan ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi
Layanan	2,12	5	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal
Layanan Administrasi Pemerintahan	2,20	5	
Layanan Publik	2,00	5	
INDEK SPBE	1,7	5	Sangat Baik

Tabel 10. Target Kematangan Kebijakan Internal SPBE Kabupaten Konawe

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE	Target
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5
Arsitektur SPBE	5
Peta Rencana SPBE	5
Manajemen Data	5
Pembangunan Aplikasi SPBE	5
Layanan Pusat Data	5
Pengoperasian Jaringan Intra	5
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
Manajemen Keamanan Informasi	5
Audit TIK	5
Tim Koordinasi SPBE	5

Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	Target
Perencanaan Strategis SPBE	5
Arsitektur SPBE	5
Peta Rencana SPBE	5
Rencana dan Anggaran SPBE	5
Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5
Pembangunan Aplikasi SPBE	5
Layanan Pusat Data	5
Layanan Jaringan Intra	5
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
Penyelenggara SPBE	5
Tim Koordinasi SPBE	5
Kolaborasi Penerapan SPBE	5

Tabel 11. Target Kematangan Manajemen SPBE Kabupaten Konawe

Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	Target
Penerapan Manajemen SPBE	5
Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
Penerapan Manajemen Data	5
Penerapan Manajemen Aset TIK	5
Penerapan Manajemen SDM	5
Penerapan Manajemen Pengetahuan	5
Penerapan Manajemen Perubahan	5
Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
Audit TIK	5
Audit Infrastruktur SPBE	5
Audit Aplikasi SPBE	5
Audit Keamanan SPBE	5

Tabel 12. Target Tingkat Kematangan Layanan SPBE

Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Target
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5
Layanan Perencanaan	5
Layanan Penganggaran	5
Layanan Keuangan	5
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
Layanan Kepegawaian	5
Layanan Pengarsipan	5
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	5
Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	5
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
Layanan Kinerja Pegawai	5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5
Layanan Publik	5
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
Layanan Data Terbuka	5
Layanan JDIH	5
Layanan Publik Sektoral-1	5
Layanan Publik Sektoral-2	5
Layanan Publik Sektoral-3	5

4.2. Target Sasaran Strategis Per Domain SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Konawe dapat dilihat di Gambar 6, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Sumber Daya Manusia SPBE

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none">• Tim Koordinasi SPBE• Arsitektur SPBE• Kebijakan SPBE• Evaluasi SPBE	<ul style="list-style-type: none">• Survey Pengguna SPBE• Portal Pelayanan Publik• Portal Administrasi Pemerintahan• Managemen Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Data• Jaringan Intra• Sistem Penghubung• Layanan Berbagi Pakai• Portal Data• Sistem Keamanan Informasi• Teknologi Kecerdasan Buatan	<ul style="list-style-type: none">• Promosi Literasi• Kapasitas ASN• Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 6. Empat Kategori Pengembangan SPBE Kabupaten Konawe

4.2.1. Tata Kelola SPBE

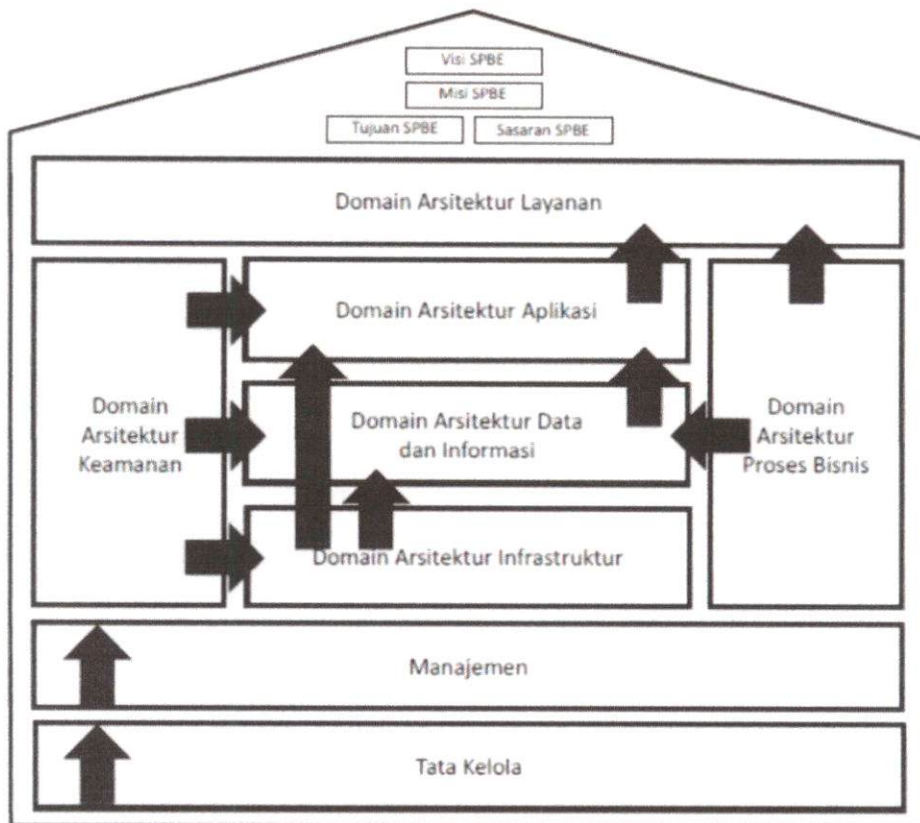
Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Terdiri dari :

- a. Arsitektur Proses Bisnis
- b. Arsitektur Layanan
- c. Arsitektur Data
- d. Arsitektur Aplikasi
- e. Arsitektur Infrastruktur
- f. Arsitektur Keamanan

Jika digambarkan secara visual keterkaitan antara keenam arsitektur tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Keterkaitan Enam Arsitektur SPBE

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Konawe agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Konawe.

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

SPBE merupakan rangkaian kerja koordinatif lintas OPD, sehingga harus dibentuk Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi SPBE memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.



Gambar 8. Struktur Organisasi Tim Koordinasi SPBE

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data

dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang SPBE akan menguatkan secara regulasi dan legitimasi program. Kepastian anggaran dan payung hukumnya akan berdampak pada program yang berkelanjutan. Kebijakan SPBE harus memuat hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan Arsitektur SPBE
- b. Kebijakan Peta Rencana SPBE
- c. Kebijakan Manajemen Data
- d. Kebijakan Aplikasi SPBE
- e. Kebijakan Layanan Pusat Data
- f. Kebijakan Jaringan Intra
- g. Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
- h. Kebijakan Manajemen Keamanan
- i. Kebijakan Audit TIK
- j. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Konawe;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Konawe dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;

- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Konawe.

2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Konawe yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Konawe;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Konawe diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
- h. Selain mengembangkan portal layanan publik, Pemerintah Kabupaten Konawe juga membangun aplikasi yang termasuk dalam kategori layanan publik dari masing-masing OPD dengan kerangka layanan publik terintegrasi (terintegrasi dalam portal layanan publik). Pengembangan aplikasi layanan publik masing-masing OPD ini apabila belum ada aplikasi umum (aplikasi dari

Pemerintah Pusat). Jika nantinya layanan publik yang sudah dibangun aplikasi oleh suatu OPD, dikemudian hari pemerintah pusat menyediakan aplikasi untuk layanan publik tersebut, maka OPD tersebut wajib menggunakan aplikasi layanan publik dari pemerintah pusat.

3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
- f. Selain membangun portal layanan administrasi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Konawe juga membangun aplikasi yang termasuk layanan administrasi pemerintahan dari masing-masing OPD dengan kerangka layanan administrasi pemerintahan terintegrasi (terintegrasi ke dalam portal layanan administrasi pemerintahan). Pengembangan aplikasi layanan administrasi pemerintahan masing-masing OPD ini apabila belum ada aplikasi umum (aplikasi dari Pemerintah Pusat). Jika nantinya layanan administrasi pemerintahan yang sudah dibangun aplikasi oleh suatu OPD, dikemudian hari pemerintah pusat menyediakan aplikasi untuk layanan administrasi pemerintahan tersebut, maka OPD tersebut wajib menggunakan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat.

4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
 - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Konawe;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Konawe;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;

- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
- e. Standarisasi fasilitas pusat data sesuai panduan dari SNI 8799:2019

2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan organisasi pemerintah daerah (OPD);
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi jaringan fiber optik, wireless atau melalui jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).
- d. Melakukan pengembangan dan optimalisasi terhadap jaringan intra yang sudah ada sehingga penggunaannya optimal dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- e. Melakukan pengembangan dan optimalisasi sistem penghubung layanan *e-Government Interoperability Framework* (e-GIF) yang sudah ada di Kabupaten Konawe.

4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;

- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
- d. Dinas Kominfo Kabupaten Konawe menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Konawe yang belum terjangkau.

5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai

- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
- d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6. Pembangunan Portal Data Daerah

- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
- c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem

keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8. Audit TIK

Melakukan audit TIK secara reguler baik secara internal ataupun eksternal yang meliputi :

- Audit Aplikasi
- Audit Infrastruktur
- Audit Keamanan Informasi

9. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

- e. Langkah pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data, antara lain:
- Pembuatan Arsitektur Big Data
 - Pengembangan Infrastruktur Big Data sesuai arsitektur
 - Pengelolaan Big Data
 - Penyiapan SDM dengan kompetensi Big Data dan Kecerdasan Buatan

4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN DAN RENCANA STRATEGIS SPBE KABUPATEN KONAWE

5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Berdasarkan kondisi saat ini dan target pada Domain Kebijakan, maka analisis kesenjangan pada Domain Kebijakan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 13. Analisis Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masih berupa konsep	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal Arsitektur SPBE perlu memuat seluruh pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). ▪ Kebijakan internal Arsitektur SPBE perlu mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE masih berupa konsep	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal Peta Rencana SPBE perlu mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
	Pusat/Pemerintah Daerah				<p>SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE perlu direviu dan dievaluasi secara periodik. ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	Kebijakan internal Manajemen Data hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data	4 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal Manajemen Data telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data; ▪ Kebijakan internal Manajemen Data perlu direviu dan dievaluasi secara periodik. ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE masih berupa konsep	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE perlu ditetapkan, dan di dalamnya mengatur siklus pembangunan aplikasi dan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Diskominfo ▪ Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE perlu mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh Diskominfo. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE perlu direviu

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>dan dievaluasi secara periodik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah ditetapkan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal Layanan Pusat Data mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data perlu direviu dan dievaluasi secara periodik. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintahan telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik; Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Daerah	1	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah masih berupa konsep	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah perlu mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah perlu direviu dan dievaluasi secara periodik.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi perlu mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi perlu mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi perlu direviu dan dievaluasi secara periodik; Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	Kebijakan internal terkait Audit TIK masih berupa konsep	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal terkait Audit TIK perlu mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Kebijakan internal terkait Audit TIK perlu direviu dan dievaluasi secara periodik; Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah perlu mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah perlu direviu dan dievaluasi secara periodik; ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru

Berdasarkan analisis kesenjangan terhadap domain kebijakan sesuai Tabel 13, maka rencana strategis SPBE Kabupaten Konawe pada Domain Kebijakan yang perlu dilakukan ditunjukkan oleh Tabel 14.

Tabel 14. Rencana Strategis Domain Kebijakan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat ini	Rencana Strategis Pengembangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan dengan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan, dan ▪ menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan dengan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan, dan ▪ menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Manajemen Data dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait pembangunan aplikasi dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru

No	Indikator	Nilai Kemata- ngan Saat ini	Rencana Strategis Pengembangan
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara berkala dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara berkala, dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan Reviu dan evaluasi kebijakan secara berkala, dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan Reviu dan evaluasi dengan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan, dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Audit TIK SPBE dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan Reviu dan evaluasi kebijakan secara berkala, dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE dan memuat poin-poin sesuai analisis kesenjangan ▪ Melakukan Reviu dan evaluasi kebijakan secara berkala; dan ▪ Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi dengan kebijakan baru

5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Penyelenggara SPBE. Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE (Tim Koordinator SPBE), adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi saat ini dan target pada Domain Tata Kelola SPBE, maka analisis kesenjangan Domain Tata Kelola ditunjukkan oleh Tabel 15.

Tabel 15. Analisis Kesenjangan Domain Tata Kelola SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Dokumen Arsitektur SPBE baru belum tersedia.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Arsitektur SPBE perlu mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE); ▪ Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik; ▪ Dokumen Arsitektur SPBE perlu dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Dokumen Peta Rencana SPBE belum tersedia	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Peta Rencana SPBE sudah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK). Dokumen Peta Rencana SPBE perlu diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE perlu dilakukan reviu

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>dan evaluasi secara periodik;</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peta Rencana SPBE perlu dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	Rencana dan Anggaran SPBE belum terpadu	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE harus terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Rencana dan Anggaran SPBE perlu direviu dan dievaluasi secara periodik; Rencana dan Anggaran SPBE perlu dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah belum tersedia	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen proses bisnis pemerintah daerah Proses Bisnis Pemerintah Daerah perlu dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis; Inovasi Proses bisnis diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik; Melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum terpadu dan dikonsultasikan kepada Diskominfo	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah harus terpadu dan dapat dikendalikan oleh Diskominfo. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik; ▪ Aplikasi SPBE dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Pusat Data perlu digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data. ▪ Perlu dilakukan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe perlu direviu dan dievaluasi secara periodik ▪ Hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data Kabupaten Konawe perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah perlu diterapkan diseluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah. ▪ Perlu adanya interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah dilakukan revidu dan dievaluasi secara periodik; ▪ Hasil revidu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah.
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1	Sistem penghubung layanan Instansi Pemerintah belum diterapkan di seluruh perangkat daerah	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem penghubung layanan Instansi Pemerintah perlu diterapkan di seluruh OPD ▪ Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah perlu terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah perlu direvidu dan dievaluasi secara periodik; ▪ Hasil revidu dan evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE belum dilaksanakan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE perlu dilaksanakan seluruhnya. ▪ Program kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dikomunikasikan/

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pemerintah Daerah. Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasi. ▪ Hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE dan pelaksanaannya.
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah	3 -5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE perlu dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh sekretaris pemerintah daerah. ▪ Kolaborasi dalam penerapan SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasi; ▪ Hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan analisis kesenjangan Domain Tata Kelola SPBE sesuai Tabel 15, maka rencana strategis SPBE Kabupaten Konawe pada Domain Tata Kelola SPBE yang perlu dilakukan ditunjukkan oleh Tabel 16.

Tabel 16. Rencana Strategis Domain Tata Kelola SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat Ini	Rencana Strategis Pengembangan
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Menyusun 6 dokumen arsitektur SPBE : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan Informasi
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	Menyusun dokumen Peta Rencana
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	Menyusun kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran SPBE yang harus dikoorodinasikan dan dikonsultasikan kepada Diskominfo dan berlaku bagi seluruh OPD dan menindaklanjuti hasil reviu
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun proses bisnis SPBE Pemerintah Kabupaten Konawe ▪ Melakukan reviu proses bisnis secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat kebijakan terkait pembuatan aplikasi harus terkoordinasi dengan Diskominfo ▪ Membuat standar dan aturan mengenai siklus pengembangan aplikasi dan berlaku bagi seluruh OPD
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh perangkat daerah perlu menggunakan layanan pusat data yang terpadu ▪ Meningkatkan interkoneksi pusat data yang ada di daerah dengan pusat data nasional ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan perbaikan standar layanan pusat data
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengembangan infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Konawe ▪ Melakukan pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintahan yang menghubungkan dengan provinsi atau pusat dan instansi lain yang terkait ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi jaringan intra pemerintahan untuk peningkatan kinerja jaringan
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan sistem penghubung layanan bagi seluruh sistem layanan OPD, pemerintah provinsi/pusat yang memerlukan dan instansi daerah lain yang terkait ▪ Menyusun standarisasi sistem penghubung layanan yang berlaku bagi seluruh OPD
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun dan melaksanakan program kerja Tim Koordinasi SPBE ▪ Melaksanakan program evaluasi SPBE yang terjadwal
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE secara terpadu

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat Ini	Rencana Strategis Pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kolaborasi dengan Tim Koordinasi SPBE daerah lain, provinsi dan pusat Melakukan reviu kolaborasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil reviu

5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Berdasarkan kondisi saat ini dan target pada domain Manajemen SPBE, Analisis kesenjangan Manajemen SPBE Kabupaten Konawe ditunjukkan oleh Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	Manajemen Risiko SPBE belum dilaksanakan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE; Kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE perlu ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik; Hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia dalam tahap pembangunan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Keamanan Informasi dilaksanakan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; pengendalian Keamanan Informasi dilakukan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	Kegiatan Manajemen Data telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Data dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data); ▪ Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Konawe. Selain itu, penerapan Manajemen Data direviu dan dievaluasi secara periodik; ▪ hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data.
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	Kegiatan Manajemen Aset TIK telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Aset TIK dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK); ▪ Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK direviu dan dievaluasi secara periodik;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	<p>Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.</p>	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE); ▪ Peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik; ▪ Hasil reviu dan evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	<p>Manajemen Pengetahuan SPBE telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa standar/pedoman</p>	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan; ▪ semua unit kerja/perangkat daerah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem

No	Indikator	Nilai Kemata- ngan	Kondisi Saat Ini	Target Kemata- ngan	Analisis Kesenjangan
					<p>aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan; ▪ kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilakukan reviu dan evaluasi; ▪ serta hasil reviu dan evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	Manajemen Layanan SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan dan diterapkan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE); ▪ Manajemen Layanan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE dilakukan reviu dan evaluasi; ▪ Hasil reviu dan evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE

No	Indikator	Nilai Kemata- ngan	Kondisi Saat Ini	Target Kemata- ngan	Analisis Kesenjangan
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; ▪ kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi; ▪ hasil audit Infrastruktur SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	Kegiatan Audit Aplikasi SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; ▪ kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi; ▪ hasil audit Aplikasi SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	Kegiatan Audit Keamanan SPBE telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; ▪ Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi; <ul style="list-style-type: none"> Hasil audit Keamanan SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE

Berdasarkan analisis kesenjangan Domain Manajemen SPBE sesuai Tabel 17, maka rencana strategis SPBE Kabupaten Konawe pada Domain Manajemen SPBE yang perlu dilakukan ditunjukkan oleh Tabel 18.

Tabel 18. Rencana Strategis Domain Manajemen SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat Ini	Rencana Strategis Pengembangan
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Manajemen Risiko SPBE Menetapkan kebijakan strategis manajemen risiko SPBE yang nantinya diterapkan oleh semua OPD Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik manajemen risiko
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun SOP dan petunjuk teknis terkait pengendalian keamanan informasi yang berlaku untuk seluruh OPD Menerapkan pengendalian keamanan informasi SPBE untuk seluruh OPD Melakukan reviu, evaluasi dan perbaikan secara periodik terkait penerapan pengendalian keamanan informasi
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman Manajemen Data yang berlaku untuk seluruh OPD Menerapkan manajemen data sesuai pedoman yang sudah dibuat untuk seluruh OPD Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen data
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman Manajemen Aset TIK yang berlaku untuk seluruh OPD Menerapkan manajemen aset TIK sesuai pedoman yang sudah dibuat untuk seluruh OPD Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen aset TIK
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman Manajemen SDM SPBE yang berlaku untuk seluruh OPD Melakukan perencanaan terkait SDM SPBE Melakukan pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM SPBE Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen SDM SPBE

No	Indikator	Nilai Kemata- ngan Saat Ini	Rencana Strategis Pengembangan
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun pedoman terkait Manajemen Pengetahuan ▪ Membangun aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE ▪ Menerapkan manajemen pengetahuan yang terintegrasi untuk seluruh OPD ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen pengetahuan SPBE
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun pedoman Manajemen Perubahan yang berlaku untuk seluruh OPD ▪ Melaksanakan manajemen perubahan sesuai pedoman ▪ Menerapkan manajemen pengetahuan yang terintegrasi untuk seluruh OPD ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen perubahan SPBE
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun pedoman Manajemen Layanan SPBE yang berlaku untuk seluruh OPD ▪ Membangun aplikasi manajemen Layanan SPBE ▪ Melakukan survei pengguna secara berkala (tingkat kepuasan masyarakat dan koreksi) ▪ Membuat <i>Call Center</i> Layanan SPBE ▪ Melaksanakan manajemen layanan untuk seluruh layanan SPBE ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait manajemen layanan SPBE
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun perencanaan dan pedoman audit infrastruktur ▪ Melaksanakan audit infrastruktur untuk seluruh OPD ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait audit infrastruktur SPBE
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun perencanaan dan pedoman audit aplikasi SPBE ▪ Melaksanakan audit aplikasi SPBE untuk seluruh OPD ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait audit aplikasi SPBE
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun perencanaan dan pedoman audit keamanan SPBE ▪ Melaksanakan audit keamanan SPBE untuk seluruh OPD ▪ Melakukan reviu, evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terkait audit keamanan SPBE

5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan *output* dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Berdasarkan kondisi saat ini dan target pada Domain Layanan, analisis kesenjangan domain layanan SPBE Kabupaten Konawe ditunjukkan oleh Tabel 19.

Tabel 19. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik sudah memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik Pemerintah Pusat/Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pemerintah Pusat/Daerah lain.	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan peningkatan/pengembangan layanan dengan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan dan penerapan manajemen layanan (<i>help desk</i>) ▪ Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Lain, Dan/Atau Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan peningkatan/pengembangan layanan dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) ▪ Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan peningkatan/pengembangan layanan dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata keola layanan, dan penerapan manajemen layanan (<i>help desk</i>) Layanan Keuangan Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan.
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan dan analitik data	4 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik harus memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Kepegawaian perlu memberikan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kepegawaian, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb. ▪ Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik perlu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya seperti layanan kinerja, layanan keuangan, layanan kepegawaian pemerintah pusat/daerah lain, dan/atau layanan SPBE instansi pusat/daerah lain. ▪ Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan.
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1	Layanan kearsipan dinamis hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. ▪ Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbasis elektronik perlu memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain; Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data; ▪ Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain; ▪ Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1	Layanan akuntabilitas kinerja hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja organisasi	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. ▪ Layanan akuntabilitas kinerja harus memberikan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
					<p>layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya seperti layanan pengadaan, layanan perencanaan, layanan keuangan, layanan akuntabilitas kinerja instansi pusat/daerah lain</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	Layanan Kinerja Pegawai berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. ▪ Layanan kinerja pegawai harus berkolaborasi dengan dengan layanan elektronik lain ▪ Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik instansi pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau layanan SPBE instansi pusat/pemerintah daerah lain	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan peningkatan/pengembangan layanan dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) ▪ Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka	3 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan data terbuka memberikan layanan interaksi dan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data; ▪ Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain; ▪ Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi	3	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan	4 - 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan

No	Indikator	Nilai Kematangan	Kondisi Saat Ini	Target Kematangan	Analisis Kesenjangan
	dan Informasi Hukum (JDIH)		transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data		elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
45	Layanan Publik Sektoral 1, Sektoral 2, dan Sektoral 3	2	Layanan publik sektoral 1 memberikan layanan interaksi terkait kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen publik sektoral, dan pengunduhan dokumen publik sektoral	3-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki beberapa layanan publik yang bersifat kolaborasi, transaksi dan interaktif ▪ Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu
46	Layanan Publik Sektoral 2	1	Layanan publik sektoral 2 hanya memberikan layanan informasi saja	3-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki beberapa layanan publik yang bersifat kolaborasi, transaksi dan interaktif ▪ Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu
47	Layanan Publik Sektoral 1, Sektoral 2, dan Sektoral 3	1	Layanan publik sektoral 3 hanya memberikan layanan informasi saja	3-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki beberapa layanan publik yang bersifat kolaborasi, transaksi dan interaktif ▪ Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala ▪ Menindaklanjuti hasil reviu

Berdasarkan analisis kesenjangan Domain Layanan sesuai Tabel 19, maka rencana strategis SPBE Kabupaten Konawe yang perlu dilakukan pada Domain Layanan ditunjukkan oleh Tabel 20.

Tabel 20. Rencana Strategis Domain Layanan SPBE

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat Ini	Rencana Strategis Pengembangan
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan perencanaan dari pemerintah pusat
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -Menggunakan aplikasi layanan penganggaran yang bersifat transaksional, terpadu dan berkolaborasi dengan layanan lainnya, atau dengan layanan penganggaran instansi pusat ▪ Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan penganggaran dari pemerintah pusat
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan aplikasi layanan keuangan yang bersifat transaksional, terpadu, dan berkolaborasi dengan layanan keuangan instansi pusat ▪ Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan keuangan dari pemerintah pusat
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan atau menggunakan layanan pengadaan yang berkolaborasi dengan layanan spbe lainnya atau layanan pengadaan dari instansi pusat ▪ Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan pengadaan dari pemerintah pusat
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan/menggunakan aplikasi layanan kepegawaian yang sudah berkolaborasi dengan layanan kepegawaian dari instansi pusat atau dengan layanan SPBE lainnya ▪ Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan kepegawaian dari pemerintah pusat
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun atau menggunakan sistem layanan kearsipan dinamis berbasis elektronik yang memberikan layanan transaksional ▪ Melakukan proses kolaborasi layanan kearsipan dengan sistem layanan lainnya ▪ Menerapkan reuiu, evaluasi dan perbaikan dari sistem layanan kearsipan dari pemerintah pusat
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan proses kolaborasi layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sistem layanan lainnya yang terkait ▪ Melaksanakan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan Pengelolaan Barang Milik Negara
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sistem layanan Pengawasan Internal berbasis elektronik yang memberikan layanan transaksional dan terpadu untuk seluruh OPD ▪ Melakukan proses kolaborasi layanan Pengawasan Internal dengan sistem layanan lainnya ▪ Melaksanakan reuiu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan Pengawasan Internal
40	Tingkat Kematangan Layanan	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sistem layanan akuntabilitas kinerja organisasi berbasis elektronik yang sudah memberikan layanan transaksional, terpadu dan berkolaborasi dengan

No	Indikator	Nilai Kematangan Saat ini	Rencana Strategis Pengembangan
	Akuntabilitas Kinerja Organisasi		<p>sistem layanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat/daerah lain</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan reviu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan akuntabilitas kinerja organisasi
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang memberikan layanan transaksional, terpadu dan berkolaborasi dengan sistem layanan kinerja pegawai instansi pemerintah pusat/daerah lain; Melaksanakan reviu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan akuntabilitas kinerja pegawai
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan layanan pengaduan publik agar berkolaborasi dengan sistem pengaduan instansi pusat/daerah lain Melaksanakan reviu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan akuntabilitas kinerja pegawai
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem layanan data terbuka berbasis elektronik yang memberikan layanan transaksional Melakukan proses kolaborasi layanan data terbuka dengan sistem layanan dan instansi lainnya yang terkait Melaksanakan reviu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan data terbuka
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan sistem JDIH seperti seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data; Melakukan proses kolaborasi layanan JDIH dengan sistem layanan dan instansi lainnya yang terkait; Melaksanakan reviu, evaluasi dan perbaikan sistem layanan JDIH
45	Layanan Publik Sektoral 1	2	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan sistem layanan publik yang interaktif, transaksional dan terpadu Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala Menindaklanjuti hasil reviu
46	Layanan Publik Sektoral 2	1	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan sistem layanan publik yang interaktif, transaksional dan terpadu Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala Menindaklanjuti hasil reviu
45	Layanan Publik Sektoral 3	1	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengembangan sistem layanan publik yang interaktif, transaksional dan terpadu Melaksanakan reviu dan evaluasi aplikasi sektoral secara berkala Menindaklanjuti hasil reviu

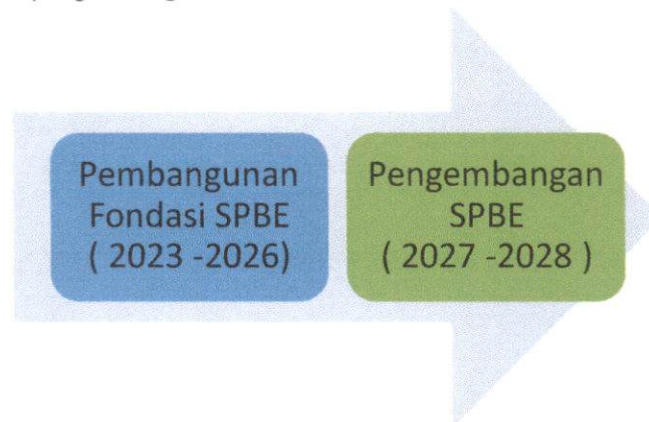
BAB VI

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN KONAWE

Berdasarkan analisis kesenjangan SPBE Kabupaten Konawe, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Konawe terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi Kesiapan SPBE tahun 2024 – 2027; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2028 – 2029.



Gambar 9. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2023 - 2026 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, infrastruktur SPBE, SDM SPBE dan program unggulan /prioritas sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Konawe
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE (Perbup/Perda)
4. Panduan / Pedoman Manajemen SPBE
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah
7. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD)
8. Infrastruktur Big Data
9. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2027 - 2028 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Proses Evaluasi dan perbaikan diseluruh komponen SPBE
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE (G2C, G2B, G2E, G2G) sesuai dengan kebutuhan pengguna
4. Analisis data menggunakan berbasis big data dan kecerdasan buatan Kabupaten Konawe
5. Peningkatan kualitas keamanan informasi
6. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Konawe, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe mulai tahun 2023 – 2028. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe tahun 2023 – 2028 dapat dilihat di tabel 21.

6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe (2023 – 2028)

Tabel 21. Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe (2023 – 2028)

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	TATA KELOLA SPBE									
1	Penguatan Kebijakan SPBE	1.1	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	
		1.2	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Bagian Hukum dan Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	
		1.3	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Manajemen Data	Bagian Hukum dan Diskominfo	Sudah ada		✓	✓	✓	
		1.4	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Bagian Hukum dan Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	
		1.5	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Bagian Hukum dan Diskominfo	Sudah ada		✓	✓	✓	
		1.6	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan	Bagian Hukum dan Diskominfo	Sudah ada		✓	✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		tentang Pengoperasian Jaringan Intra								
		1.7 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Bagian Hukum dan Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓		
		1.8 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	Bagian Hukum dan Diskominfo	Sudah ada		✓	✓	✓		
		1.9 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Audit TIK	Bagian Hukum dan Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓		
		1.10 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe	Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Diskominfo	Sudah ada		✓	✓	✓		
2	Penyusunan Arsitektur SPBE Konawe	2.1 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Konawe	Bagian Organisasi, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2.2 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Konawe	Bagian Organisasi, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	
		2.3 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Konawe	Bappeda, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	
		2.4 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Konawe	Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	
		2.5 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Konawe	Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	
		2.6 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Konawe	Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Peningkatan Kematangan Peta Rencana SPBE	3.1 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Peta Rencana SPBE	Diskominfo, Bappeda	Belum ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4.1 Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana dan Anggaran TIK	Diskominfo, Seluruh OPD	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5.1 Membuat Perbaikan Proses Bisnis Layanan OPD	Bagian Organisasi, Seluruh OPD	Belum		✓	✓	✓	✓	✓
		5.2 Penerapan Proses Bisnis ke dalam Sistem Elektronik	Seluruh OPD, Diskominfo	Sudah ada sebagian		✓	✓	✓	✓	✓
		5.3 Evaluasi dan Perbaikan Inovasi Proses Bisnis	Bagian Organisasi, Seluruh OPD	Belum		✓	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	6.1 Penyusunan Kebijakan terkait Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Aplikasi dengan Dinas Kominfo	Diskominfo, Bagian Hukum	Belum ada		✓				
		6.2 Penyusunan SOP Siklus Pengembangan Aplikasi	Diskominfo	Belum ada		✓	✓			
		6.3 Reviu, Evaluasi dan Tindak lanjut terkait Pembangunan Aplikasi	Diskominfo	Belum		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
7	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Konawe	7.1	Penyusunan SK Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe yang berisi tugas dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE	Koordinator SPBE	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
8	Peningkatan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	8.1	Melakukan Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kolaborasi Penerapan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
II MANAJEMEN SPBE											
9	Manajemen Risiko SPBE	9.1	Menyusun perencanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE	Koordinator SPBE, Inspektorat	Belum ada		✓				
		9.2	Melaksanakan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko SPBE	Koordinator SPBE, Inspektorat	Belum dilakukan		✓	✓			
		9.3	Menerapkan manajemen resiko yang terdokumentasi secara formal yang melibatkan seluruh OPD	Koordinator SPBE, Inspektorat			✓	✓	✓	✓	✓
		9.4	Menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE	Koordinator SPBE, Inspektorat			✓				

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		9.5	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Risiko SPBE	Koordinator SPBE, Inspektorat		✓	✓	✓	✓	✓	
10	Manajemen Keamanan SPBE	10.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen keamanan informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum ada		✓				
		10.2	Menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum ada		✓				
		10.3	Menyusun Arsitektur Keamanan Informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum ada		✓				
		10.4	Melakukan penilaian terhadap Indeks KAMI	Koordinator SPBE, Diskominfo	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		10.5	Melaksanakan ITSA yang bekerjasama dengan BSSN	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		10.6	Membentuk Tim CSIRT	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum ada		✓				
		10.7	Mendokumentasi setiap adanya gangguan insiden keamanan informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		10.8	Menyusun kebijakan strategis manajemen keamanan informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo	Belum ada		✓				
		10.9	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen keamanan informasi	Koordinator SPBE, Diskominfo			✓	✓	✓	✓	✓
11	Manajemen Data	11.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen data	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		✓				
		11.2	Melaksanakan rapat forum data	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		11.3	Menghimpun data sektoral perangkat daerah	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		11.4	Menyusun kebijakan strategis manajemen data	Koordinator SPBE, Bappeda	Belum ada		✓				
		11.5	Mengembangkan aplikasi Portal Data sebagai penerapan manajemen data	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah ada		✓				
		11.6	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen data	Koordinator SPBE, Bappeda			✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
12	Manajemen Aset TIK	12.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD	Sudah dilakukan		✓				
		12.2	Melakukan perencanaan dalam pengadaan aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		12.3	Proses pengadaan aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		12.4	Melakukan pengelolaan dan penghapusan terhadap aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		12.5	Menyusun kebijakan strategis manajemen aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD			✓				
		12.6	Mengembangkan aplikasi manajemen aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD				✓	✓		
		12.7	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen aset TIK	Koordinator SPBE, BPKAD			✓	✓	✓	✓	✓
13	Manajemen SDM SPBE	13.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM	Sudah ada		✓				
		13.2	Melakukan perencanaan pengadaan SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		13.3	Melakukan pengembangan SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		13.4	Melakukan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		13.5	Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		13.6	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen SDM SPBE	Koordinator SPBE, BKPSDM			✓	✓	✓	✓	✓
14	Manajemen Pengetahuan SPBE	14.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen pengetahuan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Belum		✓				
		14.2	Melakukan proses kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan terhadap manajemen pengetahuan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
		14.3	Menyusun kebijakan strategis manajemen pengetahuan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Belum		✓				
		14.4	Mengembangkan aplikasi manajemen pengetahuan	Koordinator SPBE, Bappeda	Belum			✓	✓		

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		14.5	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen pengetahuan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Belum		☑	☑	☑	☑	☑
15	Manajemen Perubahan SPBE	15.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah ada		☑				
		15.2	Melakukan perencanaan terhadap perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		☑	☑			
		15.3	Menganalisis perubahan dan pengembangan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		☑	☑	☑	☑	☑
		15.4	Melakukan pengembangan terhadap perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		☑	☑	☑	☑	☑
		15.5	Melakukan implementasi terhadap perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan		☑	☑	☑	☑	☑
		15.6	Melakukan Evaluasi terhadap perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah dilakukan			☑	☑	☑	☑
		15.7	Menyusun kebijakan strategis manajemen perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda			☑				
		15.8	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen perubahan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda				☑	☑	☑	☑

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
16	Manajemen Layanan SPBE	16.1	Menyusun perencanaan penerapan manajemen layanan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda	Sudah ada		✓				
		16.2	Menyusun service katalog pelayanan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda		✓					
		16.3	Membuat penanganan gangguan/helpdesk pada layanan spbe	Koordinator SPBE, Bappeda		✓	✓	✓	✓	✓	
		16.4	Menyusun dokumen Standar Level Agreement (SLA) layanan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda		✓	✓				
		16.5	Pengembangan aplikasi layanan SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda		✓	✓	✓	✓	✓	
		16.6	Evaluasi dan tindak lanjut manajemen layanan SPBE SPBE	Koordinator SPBE, Bappeda		✓	✓	✓	✓	✓	
III	LAYANAN										
17	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan	17.1	Evaluasi dan tindak lanjut layanan Perencanaan	Bappeda	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		17.2 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Penganggaran, dan Keuangan	BPKAD	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.3 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.4 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Kepegawaian	BKPSDM	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.5 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Pengarsipan	Disperpusip	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.6 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.7 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Pengawasan Pemerintah	Inspektorat	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.8 Evaluasi dan tindak lanjut layanan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		17.9 Evaluasi dan tindak lanjut layanan kinerja pegawai	BKPSDM	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
18	Peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	18.1	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengaduan	Diskominfo	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		18.2	Pengembangan Integrasi Layanan Satu Data	Diskominfo	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		18.3	Pengembangan Layanan JDIH	Bagian Hukum	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		18.4	Pengembangan Portal Layanan Publik	Diskominfo dan OPD terkait	Sudah ada aplikasi		✓	✓	✓	✓	✓
		18.5	Survei Kebutuhan dan Kepuasan masyarakat terhadap SPBE	Bagian Organisasi, Diskominfo	Sudah dilakukan		✓	✓	✓	✓	✓
IV	APLIKASI										
19	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan	19.1	Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.2	Pengembangan Modul Sistem Layanan Informasi Kesehatan:	Dinas Kesehatan, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pelaporan Penyakit Rabies - Sistem Pelaporan Penyakit ISPA - Sistem Pelaporan Penyakit Filariasis dan Kecacingan - Satu Data Sehat 								
		19.3 Pengembangan Modul Layanan Perijinan dan Investasi (Aplikasi SKM dan IKM)	DPMPTSP, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.4 Pengembangan Modul Layanan Sosial (Aduan bagi lansia, penyandang disabilitas dan NAPZA, Aduan Anak Bermasalah dengan Hukum)	Dinas Sosial, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.5 Pengembangan Modul Layanan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.6 Pengembangan Modul Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat:	Satpol PP dan Damkar, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<ul style="list-style-type: none"> - SIPENASPOL-PP (Sistem Pengaduan Masyarakat Polisi Pamong Praja) - SILANGGAY (Sistem Informasi Layanan Gangguan Kebakaran dan Penyelamatan) 								
		19.7 Pengembangan Modul Sistem Layanan Perpustakaan dan Kearsipan: <ul style="list-style-type: none"> - Ebook Digital - Perpusda Digital E-Library - E-Arsip 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.8 Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Gendfer dan Anak (SIGA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.9 Pengembangan Modul Sistem Layanan E-Katalog Lokal dan Layanan Aset GIS	Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		19.10 Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Sektoral Berbasis GIS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.11 Pengembangan Modul Sistem Verifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.12 Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengendalian Pekerjaan Kontruksi (SIMPAN POKOK)	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Diskominfo	Belum ada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		19.13 Pengembangan Modul Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
		19.14 Pengembangan Modul Sistem Layanan Izin Penelitian (E-Simpel)	Badan Penelitian dan Pengembangan, Diskominfo	Belum ada		✓	✓	✓	✓	✓
V	INFRASTRUKTUR									
20	Peningkatan Kematangan Layanan Pusat Data	20.1 Pengembangan Pusat Data dan Layanan Pusat Data sesuai dengan Standar Internasional	Diskominfo	Sudah ada layanan Pusat Data				✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		dan integrasi dengan Pusat Data Nasional								
21	Peningkatan Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Konawe	21.1 Pengembangan dan optimalisasi jaringan interkoneksi tertutup antar OPD sampai ke kelurahan	Diskominfo	Sudah ada jaringan intra pemerintah		✓	✓	✓		
		21.2 Reviu, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo				✓	✓	✓	✓
22	Peningkatan Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	22.1 Pengembangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Sistem Penghubung Layanan Daerah	Diskominfo	Sudah ada SPL		✓	✓	✓	✓	✓
VI	KEAMANAN									
23	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	23.1 Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ke seluruh ASN	Diskominfo			✓	✓	✓	✓	✓
		23.2 Pembuatan <i>Perimeter Security</i> untuk jaringan server	Diskominfo				✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		23.3	Pengamanan <i>host server</i>	Komunikasi dan Informatika – (Diskominfo)			✓	✓	✓	✓
		23.4	Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi	Komunikasi dan Informatika – (Diskominfo)			✓	✓	✓	✓
		23.5	Pembentukan <i>Incident Response Team</i>	Komunikasi dan Informatika – (Diskominfo)			✓	✓	✓	✓
		23.6	Melakukan VAPT (<i>Vulnerability Assessment Penetration Testing</i>) secara reguler	Komunikasi dan Informatika – (Diskominfo)				✓	✓	✓
VII	AUDIT TIK									
24	Audit Infrastruktur SPBE	24.1	Menyusun perencanaan penerapan audit infratraktur SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓		✓	
		24.2	Menyusun dan menetapkan tim audit internal infratraktur SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓			

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		24.3	Membuat permohonan akun aplikasi audit internal BRIN	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		24.4	Melakukan audit internal terhadap infrastruktur SPBE	Inspektorat, Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		24.5	Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap infrastruktur SPBE ke lembaga tersertifikasi	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		24.6	Melakukan audit eksternal terhadap infrastruktur SPBE	Diskominfo	Belum ada				✓		✓
		24.7	Evaluasi dan tindak lanjut penerapan audit infrastruktur SPBE	Inspektorat, Diskominfo					✓	✓	✓
25	Audit Aplikasi SPBE	25.1	Menyusun perencanaan penerapan audit aplikasi SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓		✓		
		25.2	Menyusun dan menetapkan tim audit internal aplikasi SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓				
		25.3	Membuat permohonan akun aplikasi audit internal BRIN	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		25.4	Melakukan audit internal terhadap aplikasi SPBE	Inspektorat, Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		25.5	Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap aplikasi SPBE ke lembaga tersertifikasi	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		25.6	Melakukan audit eksternal terhadap aplikasi SPBE	Diskominfo	Belum ada				✓		✓
		25.7	Evaluasi dan tindak lanjut penerapan audit aplikasi SPBE	Inspektorat, Dinkominfo				✓	✓	✓	
26	Audit Keamanan SPBE	26.1	Menyusun perencanaan penerapan audit keamanan SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓		✓		
		26.2	Menyusun dan menetapkan tim audit internal keamanan SPBE	Diskominfo	Belum ada		✓				
		26.3	Melakukan audit internal terhadap keamanan SPBE	Inspektorat, Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		26.4	Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab (Urusan – OPD)	Baseline	Waktu Pelaksanaan					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		keamanan SPBE ke lembaga tersertifikasi								
		26.5 Melakukan audit eksternal terhadap keamanan SPBE	Diskominfo	Belum ada			✓		✓	
		26.6 Evaluasi dan tindak lanjut penerapan audit keamanan SPBE	Inspektorat, Diskominfo					✓	✓	✓

✓ : Penyusunan kebijakan/SOP/pedoman, pelaksanaan awal, penerapan, pengembangan

✓ : Reviu dan Evaluasi

✓ : Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Konawe yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Konawe.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama kegiatan, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

Kegiatan 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode	1.1
Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN-RB Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat. Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Kegiatan 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode	1.2
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum, Bappeda dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Kegiatan 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode	1.3
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum, Bappeda dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Kegiatan 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode	1.4
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan FGD revidu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi • Melakukan revidu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi

Kegiatan 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	1.5
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data • Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data • Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional • Membuat SOP Pusat Data • Melakukan FGD Reuiu dan evaluasi kebijakan Pusat Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan • Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data

Kegiatan 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	1.6
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi jaringan intra, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi jaringan intra, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra

Program 1.7. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode	1.7
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi lain Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum Melakukan sosialisasi kebijakan Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan. Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.

Kegiatan 1.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode	1.8
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Kegiatan 1.9. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Audit TIK

Kode	1.9
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Audit TIK
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN-RB • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan). • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK • Notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal • Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan

Kegiatan 1.10. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe

Kode Program	1.10
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak lanjut Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan FGD reuiu dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe • Melakukan reuiu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN-RB • Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koorodinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Kegiatan 2.1. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Konawe

Kode	2.1
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024 - 2027
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo, didukung oleh semua OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis • Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis • Implementasi proses bisnis digital (<i>workflow, authorization</i>), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah). • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal. • Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik. • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi Inovasi.

Kegiatan 2.2. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Konawe

Kode	2.2
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024 - 2027
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE. • Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Kegiatan 2.3. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Konawe

Kode	2.3
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024-2027
Penanggungjawab	Bappeda dan Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data. • Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Kegiatan 2.4. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Konawe

Kode	2.4
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024 - 2027
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. • Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Kegiatan 2.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur
Infrastruktur Kabupaten Konawe

Kode	2.5
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024-2027
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur infrastruktur • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. • Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Kegiatan 2.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaiki Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Konawe

Kode	2.6
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaiki Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024-2027
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur Keamanan Informasi SPBE.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi. • Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur Keamanan Informasi SPBE.

Kegiatan 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Peta Rencana SPBE

Kode	3.1
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2023 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo, Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Rencana SPBE disusun untuk mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK); • Dokumen Peta Rencana SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. • Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap dokumen Peta Rencana SPBE untuk disesuaikan dengan kondisi anggaran dan keberhasilan pelaksanaannya; • Dokumen Peta Rencana SPBE perlu dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe. • Dokumentasi Peta Rencana SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe.

Kegiatan 4.1. Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana dan Anggaran TIK

Kode	4.1
Nama Kegiatan	Penyusunan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana dan Anggaran TIK
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE
Tahun	2024 – 2028
Penanggungjawab	Diskominfo, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan FGD dengan agenda reviu terkait pelaksanaan rencana dan anggaran SPBE pada periode sebelumnya; Melakukan revisi Rencana dan Anggaran SPBE perlu untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Bukti dukung telah dilakukannya reviu dapat berupa: notulensi/catatan/reviu pembahasan Rencana dan Anggaran SPBE, bukti undangan rapat reviu Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu Rencana dan Anggaran SPBE Bukti dukung telah dilakukannya tindak lanjut hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE dapat berupa: dokumen Rencana dan Anggaran SPBE yang telah dimutakhirkan.

Kegiatan 5.1. Membuat Perbaikan sebagai Inovasi Proses Bisnis Layanan OPD

Kode	5.1
Nama Kegiatan	Membuat Perbaikan Proses Bisnis Layanan OPD
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terhadap penerapan dan efektifitas proses bisnis SPBE OPD yang ada Melakukan perbaikan proses bisnis SPBE OPD sebagai bentuk Inovasi Proses Bisnis Melakukan pengesahan perubahan proses bisnis SPBE oleh Pimpinan terkait; Melakukan sosialisasi perubahan proses bisnis kepada seluruh <i>stakeholder</i> terkait
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen model Proses Bisnis SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.

Kegiatan 5.2. Penerapan Proses Bisnis ke dalam Sistem Elektronik

Kode	5.2
Nama Kegiatan	Penerapan Proses Bisnis ke dalam Sistem Elektronik
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Seluruh OPD, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Inovasi Proses bisnis ke dalam Sistem Elektronik Melakukan update sistem elektronik sesuai dengan prinsip dan pedoman dari Manajemen Perubahan sistem elektronik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.

Kegiatan 5.3. Evaluasi dan Perbaikan Inovasi Proses Bisnis

Kode	5.3
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Perbaikan Inovasi Proses Bisnis
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik; Melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi.

Kegiatan 6.1. Penyusunan Kebijakan terkait Konsultasi dan Koordinasi dalam Pengembangan Aplikasi OPD dengan Dinas Kominfo

Kode	6.1
Nama Kegiatan	Penyusunan Kebijakan terkait Konsultasi dan Koordinasi dalam Pengembangan Aplikasi OPD dengan Dinas Kominfo
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Tahun	2024
Penanggungjawab	Diskominfo, Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kebijakan terkait Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Kominfo dalam Pembangunan Aplikasi • Dokumen notulensi, presensi dan foto kegiatan FGD dalam pembahasan kebijakan

Kegiatan 6.2. Penyusunan SOP Siklus Pengembangan Aplikasi

Kode	6.2
Nama Kegiatan	Penyusunan SOP Siklus Pengembangan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait SOP yang akan dibuat • Identifikasi <i>stakeholder</i> yang terkait dengan SOP • Menentukan langkah-langkah SOP Pengembangan Aplikasi yang memuat bagian-bagian siklus pengembangan aplikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perencanaan ○ Analisis ○ Desain ○ Implementasi ○ Pemeliharaan • Menetapkan langkah kebutuhan dokumentasi dalam setiap bagian-bagian siklus pengembangan aplikasi • Melakukan penetapan dan pengesahan SOP • Melakukan sosialisasi SOP
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SOP Pengembangan Aplikasi • Dokumen notulensi, presensi dan foto kegiatan FGD dalam pembahasan SOP

Kegiatan 6.3. Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut terkait Pembangunan Aplikasi

Kode	6.3
Nama Kegiatan	Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut terkait Pembangunan Aplikasi
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan data dan dokumen terkait kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan aplikasi • Melakukan identifikasi isu permasalahan dan kendala pelaksanaan pembangunan aplikasi • Merumuskan langkah-langkah perbaikan dan rekomendasi berdasarkan data permasalahan dan kendala yang teridentifikasi • Menetapkan langkah-langkah perbaikan sebagai rekomendasi dan memasukkan ke dalam kebijakan dan atau SOP yang terkait pengembangan Aplikasi SPBE apabila diperlukan • Melakukan sosialisasi terhadap hasil reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> terkait
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen notulensi, presensi dan foto kegiatan FGD terkait reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi • Dokumen rekomendasi perbaikan terkait pengembangan aplikasi

Kegiatan 7.1. Evaluasi dan Tindak Lanjut Program Kerja Tim Koordinasi SPBE

Kode	7.1
Nama Program	Evaluasi dan Tindak Lanjut Program Kerja Tim Koordinasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Konawe
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Koordinator SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan isu-isu strategis terhadap pelaksanaan SPBE • FGD reviu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut • Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Kegiatan 8.1. Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kolaborasi Penerapan SPBE

Kode Program	8.1
Nama Kegiatan	Reviu, Evaluasi dan Tindak Lanjut Kolaborasi Penerapan SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE ▪ Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Kegiatan 9. Manajemen Risiko SPBE

Kode	9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Nama Kegiatan	Manajemen Risiko SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Risiko SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Inspektorat, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE • Melaksanakan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko SPBE • Menerapkan manajemen resiko yang terdokumentasi secara formal yang melibatkan seluruh OPD • Menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE. • Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi • Pedoman internal (level unit)/kebijakan yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan. • Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE • Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Kegiatan 9.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Risiko SPBE

Kode	9.5
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Risiko SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Risiko SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Inspektorat, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi isu permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko SPBE • Melakukan evaluasi dan pembahasan terkait pelaksanaan manajemen risiko SPBE • Menetapkan rekomendasi perbaikan terkait manajemen risiko SPBE • Melakukan sosialisasi hasil evaluasi dan revidi manajemen risiko SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan hasil revidi dan evaluasi secara berkala • Notulensi/catatan/laporan hasil revidi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE • Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Kegiatan 10. Manajemen Keamanan SPBE

Kode	10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Nama Kegiatan	Manajemen Keamanan SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Keamanan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan manajemen keamanan informasi • Menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi • Menyusun Arsitektur Keamanan Informasi • Melakukan penilaian terhadap Indeks KAMI • Melaksanakan ITSA yang bekerjasama dengan BSSN • membentuk Tim CSIRT • mendokumentasi setiap adanya gangguan insiden keamanan informasi • Menyusun kebijakan strategis manajemen keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi • Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perban/pegub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI"). • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja.

Kegiatan 10.9. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Keamanan Informasi

Kode	10.9
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Keamanan Informasi
Inisiatif Strategis	Manajemen Keamanan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi • Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil reuiu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja • Notulen/output atas evaluasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi • Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

Kegiatan 11. Manajemen Data

Kode	11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
Nama Kegiatan	Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Manajemen Data
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bappeda, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan manajemen data • Melaksanakan rapat forum data • Menghimpun data sektoral perangkat daerah • Menyusun kebijakan strategis manajemen data • Mengembangkan aplikasi SEDEB sebagai penerapan manajemen data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.

Kegiatan 11.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Data

Kode	11.6
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Manajemen Data
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bappeda, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data • Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data • Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Kegiatan 12. Manajemen Aset TIK

Kode	12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6
Nama Kegiatan	Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Manajemen Aset TIK
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BPKAD, Diskominfo, Bappeda, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan manajemen aset TIK • Melakukan perencanaan dalam pengadaan aset TIK • Proses pengadaan aset TIK • Melakukan pengelolaan dan penghapusan terhadap aset TIK • Menyusun kebijakan strategis manajemen aset TIK • Mengembangkan aplikasi manajemen aset TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK • Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK • Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan. • Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK) • Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja. • Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Kegiatan 12.7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Aset TIK

Kode	12.7
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Manajemen Aset TIK
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BPKAD, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring aset TIK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK • Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Kegiatan 13. Manajemen SDM SPBE

Kode	13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5
Nama Kegiatan	Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen SDM SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun perencanaan penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Melakukan perencanaan pengadaan SDM SPBE ▪ Melakukan pengembangan SDM SPBE ▪ Melakukan pembinaan dan pendayagunaan SDM SPBE ▪ Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan

Kegiatan 13.6. Evaluasi, dan Tindak Lanjut Manajemen SDM SPBE

Kode	13.6
Nama Kegiatan	Evaluasi, dan Tindak Lanjut Manajemen SDM SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen SDM SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya ▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan ▪ Laporan pemenuhan/realisasinya ▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.

Kegiatan 14. Manajemen Pengetahuan

Kode	14.1, 14.2, 14.3, 14.4
Nama Kegiatan	Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Manajemen Pengetahuan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan manajemen pengetahuan SPBE • Melakukan proses kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan terhadap manajemen pengetahuan SPBE • Menyusun kebijakan strategis manajemen pengetahuan spbe • Mengembangkan aplikasi manajemen pengetahuan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan. • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja

Kegiatan 14.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Pengetahuan

Kode	14.5
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Manajemen Pengetahuan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengeskplotasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagi pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan • Aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo) • Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja • Dokumen reuiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reuiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Kegiatan 15. Manajemen Perubahan SPBE

Kode	15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7
Nama Kegiatan	Manajemen Perubahan SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Perubahan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan manajemen perubahan SPBE • Melakukan perencanaan terhadap perubahan SPBE • Menganalisis perubahan dan pengembangan SPBE • Melakukan pengembangan terhadap perubahan SPBE • Melakukan implementasi terhadap perubahan SPBE • Melakukan Evaluasi terhadap perubahan SPBE • Menyusun kebijakan strategis manajemen perubahan SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan • Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan • Pedoman formal mengenai manajemen perubahan. • Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja

Kegiatan 15.8. Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Perubahan SPBE

Kode	15.8
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Manajemen Perubahan SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Perubahan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus • Mengembangkan sistem manajemen perubahan • Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya • Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan. • Pedoman formal mengenai manajemen perubahan. • Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo) • Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan • Dokumen revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan • Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Kegiatan 16. Manajemen Layanan SPBE

Kode	16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5
Nama Kegiatan	Manajemen Layanan SPBE
Inisiatif Strategis	Manajemen Layanan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan penerapan manajemen layanan SPBE Menyusun service katalog pelayanan SPBE Membuat penanganan gangguan/helpdesk pada layanan spbe Menyusun dokumen Standar Level Agreement (SLA) layanan SPBE Pengembangan aplikasi layanan SPBE
Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.

Kegiatan 16.6. Evaluasi, dan Tindak Lanjut Manajemen Layanan

Kode	16.6
Nama Kegiatan	Evaluasi, dan Tindak Lanjut Manajemen Layanan
Inisiatif Strategis	Manajemen Layanan SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo, Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo). Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video). Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Kegiatan 17.1. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Perencanaan

Kode	17.1
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Perencanaan
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu dan evaluasi layanan perencanaan • Menerapkan sistem aplikasi perencanaan sesuai dengan aplikasi umum dari pemerintah pusat • Menyesuaikan perubahan sistem sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat terkait perencanaan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Perencanaan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 17.2. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Penganggaran dan Keuangan

Kode	17.2
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Penganggaran dan Keuangan
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BPKAD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi layanan penganggaran dan keuangan Menerapkan sistem aplikasi penganggaran dan keuangan sesuai dengan aplikasi umum dari pemerintah pusat Menyesuaikan perubahan sistem sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat terkait penganggaran dan keuangan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Penganggaran dan Keuangan Daerah Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 17.3. Reviu dan Evaluasi Integrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	17.3
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu dan evaluasi layanan Pengadaan Barang dan Jasa Menerapkan sistem aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan aplikasi umum dari pemerintah pusat Menyesuaikan perubahan sistem sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat terkait Pengadaan Barang dan Jasa
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 17.4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Integrasi Layanan Kepegawaian

Kode	17.4
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Integrasi Layanan Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 17.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Kearsipan

Kode Program	17.5
Nama Kegiatan	Evaluasi dan tindak lanjut layanan Pengarsipan
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Disperpusip
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan undang undang arsip nasional • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas • Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik • Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian • Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Kegiatan 17.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode	17.6
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BPKAD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan barang milik daerah/negara • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Kegiatan 17.7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengawasan Internal

Kode	17.7
Nama Kegiatan	Evaluasi dan tindak lanjut Layanan Pengawasan Internal
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Inspektorat
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Memastikan bisnis proses telah terintegrasi Menyediakan fungsi dalam aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi Menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya Atau membangun single database untuk seluruh proses Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Kegiatan 17.8. Evaluasi dan Tindak Lanjut Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Kode	17.8
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Memastikan bisnis proses telah terintegrasi Menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengintegrasikan dan berbagi data/informasi dengan layanan SPBE lainnya Atau membangun single database untuk seluruh proses Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun otomatis. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Kegiatan 17.9. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Kinerja Pegawai

Kode	17.9
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Kinerja Pegawai
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	BKPSDM
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kinerja pegawai yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 18.1. Evaluasi dan Tindak Lanjut Layanan Pengaduan

Kode	18.1
Nama Program	Evaluasi dan Tindak Lanjut Integrasi Layanan Pengaduan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Menentukan <i>single contact</i> pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) Membuat sistem penyarangan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai Melakukan pencatatan (<i>log</i>) Memonitor waktu respon <i>Tracking</i> penyelesaian pengaduan Eskalasi pengaduan dengan kriteria Evaluasi pengaduan secara berkala Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Kegiatan 18.2. Pengembangan Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Konawe

Kode Program	18.2
Nama Kegiatan	Pengembangan Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan <i>Data Security</i> • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku) • Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020. • Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data • Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data • Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data • Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Kegiatan 18.3. Pengembangan Layanan JDIH

Kode	18.3
Nama Kegiatan	Pengembangan Layanan JDIH
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Administrasi Pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Hukum, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi • Menyediakan fungsi dalam aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi • Menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. • Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE • Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Kegiatan 18.4. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Konawe

Kode	18.4
Nama Kegiatan	Pengembangan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Pelayanan Publik
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik Menerapkan <i>Single Sign On</i> Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.

Kegiatan 18.5. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode	18.5
Nama Kegiatan	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat metode survei (elektronik atau manual) Menentukan kuesioner survei Mengumpulkan data Melakukan analisa data hasil survei Menampilkan hasil survei

Kegiatan 19.1. Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Kode Program	19.1
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Ketahanan Pangan, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) • Membuat single sign on layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.2. Pengembangan Sistem Layanan Informasi Kesehatan

Kode Program	19.2
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan Informasi Kesehatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kesehatan, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pelaporan Penyakit Rabies - Sistem Pelaporan Penyakit ISPA - Sistem Pelaporan Penyakit Filariasis dan Kecacingan - Satu Data Sehat • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis menggunakan sistem penghubung layanan • Membuat single sign on layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.3. Pengembangan Layanan Perijinan dan Investasi (Aplikasi SKM dan IKM)

Kode Program	19.3
Nama Program	Pengembangan Modul Layanan Perijinan dan Investasi (Aplikasi SKM dan IKM)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	DPMPTSP, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.4. Pengembangan Modul Sistem Layanan Sosial (Aduan bagi lansia, penyandang disabilitas dan NAPZA, Aduan Anak Bermasalah dengan Hukum)

Kode Program	19.4
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan Sosial (Aduan bagi lansia, penyandang disabilitas dan NAPZA, Aduan Anak Bermasalah dengan Hukum)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Sosial, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) atau penyatuan database • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.5. Pengembangan Modul Sistem Layanan UMKM

Kode Program	19.5
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan UMKM
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) atau penyatuan database • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.6. Pengembangan Modul Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat

Kode Program	19.6
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat: - SIPENASPOL-PP (Sistem Pengaduan Masyarakat Polisi Pamong Praja) - SILANGGAY (Sistem Informasi Layanan Gangguan Kebakaran dan Penyelamatan)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) atau penyatuan database • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.7. Pengembangan Modul Sistem Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Program	19.7
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan Perpustakaan dan Kearsipan: - Ebook Digital - Perpusda Digital E-Library - E-Arsip
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.8. Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Gendfer dan Anak (SIGA)

Kode Program	19.8
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.9. Pengembangan Modul Sistem Layanan E-Katalog Lokal dan Layanan Aset GIS

Kode Program	19.9
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan E-Katalog Lokal dan Layanan Aset GIS
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.10. Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Sektoral Berbasis GIS

Kode Program	19.10
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Informasi Data Sektoral Berbasis GIS
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bappeda, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.11. Pengembangan Modul Sistem Verifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Kode Program	19.11
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Verifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.12. Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengendalian Pekerjaan Kontruksi (SIMPAN POKOK)

Kode Program	19.12
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Informasi Pengendalian Pekerjaan Kontruksi (SIMPAN POKOK)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2023 - 2028
Penanggungjawab	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.13. Pengembangan Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Kode Program	19.13
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 19.14. Pengembangan Modul Sistem Layanan Izin Penelitian (E-Simpel)

Kode Program	19.13
Nama Program	Pengembangan Modul Sistem Layanan Izin Penelitian (E-Simpel)
Inisiatif Strategis	Pengembangan modul aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Badan Penelitian dan Pengembangan, Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE • Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait • Merangkai modul aplikasi berbasis proses bisnis, dengan menggunakan sistem penghubung layanan (<i>Government Service Bus</i>) untuk terhubung dengan layanan pengaduan yang sudah ada • Membuat <i>single sign on</i> layanan untuk pengguna • Mengintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Screenshot</i> aplikasi terintegrasi • Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi

Kegiatan 20.1. Pengembangan Pusat Data dan Layanan Pusat Data sesuai dengan Standar Internasional

Kode	20.1
Nama Kegiatan	Pengembangan Pusat Data dan Layanan Pusat Data sesuai dengan Standar Internasional
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2026 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan layanan SPBE yang menggunakan pusat data Provinsi Jawa Tengah • Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo • Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN <p>Menggunakan Pusat Data Provinsi Jawa Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan layanan SPBE yang menggunakan pusat data Provinsi Jawa Tengah • Melakukan pengajuan layanan colocation atau IaaS ke Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah • Melakukan proses migrasi server dan layanan ke pusat data Provinsi Jawa Tengah <p>Menggunakan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942, untuk mengukur kelayakan rated internasional • Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen • Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan • Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM • Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. • Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja • Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. • Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data • Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. • FGD review dan evaluasi layanan pusat data • Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku". • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data • Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja • Katalog layanan pusat data. • Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat Data • Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

Kegiatan 21.1. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah

Kode	21.1
Nama Kegiatan	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i> • Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain;
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Jaringan Intra • Prosedur operasional layanan jaringan intra • Prosedur pemeliharaan dan • Katalog layanan Jaringan Intra • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra • Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra • Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra

Kegiatan 21.2. Reviu, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Kode	21.2
Nama Kegiatan	Reviu, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Katalog layanan Jaringan Intra Notulensi, presensi dan foto kegiatan review dan evaluasi layanan jaringan intra Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra

Kegiatan 22.1. Pengembangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Sistem Penghubung Layanan Daerah

Kode	22.1
Nama Kegiatan	Pengembangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Sistem Penghubung Layanan Daerah
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Seluruh OPD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Kegiatan 23.1. Sosialisasi Security Awareness ke seluruh ASN

Kode Program	23.1
Nama Program	Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ke seluruh ASN
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat media edukasi yang menyenangkan tentang keamanan untuk ASN • Memanfaatkan media pembelajaran online untuk mengedukasi • Menilai seberapa paham dan mengerti dengan sertifikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kegiatan

Kegiatan 23.2. Pembuatan Perimeter Security untuk Jaringan Server

Kode Program	23.2
Nama Program	Pembuatan Perimeter Security untuk Jaringan Server
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi dari analisa risiko yang ada • Menerapkan Firewall, IDS dan IPS pada sistem server yang ada • Melakukan monitoring keamanan melalui NOC (<i>Network Operation Center</i>) dan SOC (<i>Security Operation Center</i>)
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi desain perimeter untuk server

Kegiatan 23.3. Pengamanan host server

Kode Program	23.3
Nama Program	Pengamanan host server
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi dari analisa risiko yang ada • Menerapkan patch pada host dan tidak menggunakan konfigurasi standar pada server • Melakukan monitoring keamanan melalui NOC (Network Operation Center) dan SOC (Security Operation Center)
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi desain keamanan untuk server

Kegiatan 23.4. Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi

Kode Program	23.4
Nama Program	Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan CA (<i>Certificate Authority</i>) dari BSSN • Menerapkan CA untuk keperluan https, tanda tangan elektronik dan lainnya
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi penggunaan enkripsi daerah

Kegiatan 23.5. Pembentukan *Incident Response Team*

Kode Program	23.5
Nama Program	Pembentukan <i>Incident Response Team</i>
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim lintas OPD • Melakukan sosialisasi SOP Incident response team • Meningkatkan kapasitas tim • Menerapkan aplikasi penanganan insiden untuk analisa
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi tim • Dokumensi notulensi koordinasi • Daftar insiden yang ada

Kegiatan 23.6. Melakukan VAPT (*Vulnerability Assessment Penetration Testing*) secara reguler

Kode Program	23.6
Nama Program	Melakukan VAPT (<i>Vulnerability Assessment Penetration Testing</i>) secara reguler
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2026 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk pihak ketiga atau melakukan sendiri VAPT • Menjalankan prosedur VAPT • Memilih ruang lingkup VAPT (aplikasi / infrastruktur)
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil VAPT

Kegiatan 24. Audit Infrastruktur Kabupaten Konawe

Kode	24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.5, 25.6
Nama	Melaksanakan Audit Infrastruktur Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Infrastruktur SPBE
Tahun	2025-2028
Penanggungjawab	Inspektorat
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan audit infratraktur SPBE • Menyusun dan menetapkan tim audit internal infrastruktur SPBE • membuat permohonan akun aplikasi audit internal BRIN • Melakukan audit internal terhadap infrastruktur SPBE • Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap infrastruktur SPBE ke lembaga tersertifikasi • Melakukan audit eksternal terhadap infrastruktur SPBE • Membuat dokumen audit
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi

Kegiatan 24.7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Infrastruktur

Kode	24.7
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Infrastruktur
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Infrastruktur SPBE
Tahun	2026-2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa hasil audit • Melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil audit
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Kegiatan 25. Audit Aplikasi Kabupaten Konawe

Kode	25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6
Nama	Menyusun Perencanaan dan Melaksanakan Audit Aplikasi Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Aplikasi SPBE
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Inspektorat
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan audit aplikasi SPBE • Menyusun dan menetapkan tim audit internal aplikasi SPBE • membuat permohonan akun aplikasi audit internal BRIN • Melakukan audit internal terhadap aplikasi SPBE • Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap aplikasi SPBE ke lembaga tersertifikasi • Melakukan audit eksternal terhadap aplikasi SPBE • Membuat dokumen audit
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi

Kegiatan 25.7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Aplikasi

Kode	25.7
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Aplikasi
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Aplikasi SPBE
Tahun	2026 - 2028
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa hasil audit • Melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil audit
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Kegiatan 26. Audit Keamanan Kabupaten Konawe

Kode	26.1, 16.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6
Nama	Audit Keamanan Kabupaten Konawe
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Keamanan SPBE
Tahun	2024 - 2027
Penanggungjawab	Inspektorat
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan penerapan audit keamanan SPBE • Menyusun dan menetapkan tim audit internal keamanan SPBE • Melakukan audit internal terhadap keamanan SPBE • Melakukan usulan untuk audit eksternal terhadap keamanan SPBE ke lembaga tersertifikasi • Melakukan audit eksternal terhadap keamanan SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi

Kegiatan 26.6. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keamanan

Kode	26.6
Nama Kegiatan	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keamanan
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kematangan Penerapan Audit Keamanan SPBE
Tahun	2026 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa hasil audit • Melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil audit
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe tahun 2023 – 2028 memuat analisis kondisi saat ini terkait kondisi aktual penerapan, dan kebijakan dalam pengembangan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Konawe. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Konawe sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Konawe, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Konawe meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Konawe meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Konawe harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe .

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Konawe dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Konawe selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Konawe yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

PJ. BUPATI KONAWA,

HARMIN RAMBA

